



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

Nurwindi Sahrudin ^a, Mattoasi ^b, Ayu Rakhma Wuryandini ^c

^{a b c} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: windisahrudin99@gmail.com ^a, mattoasi.ung.ac.id ^b, ayurakhma@ung.ac.id ^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 3 Agustus 2024

Revised : 15 Agustus 2024

Accepted : 19 Agustus 2024

Kata Kunci: Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Keywords: Implementation Of The Regional Financial Information System (SIKD)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang diajukan kepada para informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan teori Delone & Mclean Tahun 1981 yang diberi nama *Success Theory/Success model*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dalam pelaksanaan-nya pada BPKD Kota Kotamobagu belum dilaksanakan secara penuh, dimana instansi BPKD Kota Kotamobagu untuk menyempurnakan tujuan dari adanya sistem pelaporannya membagi peng-inputannya dengan rincian perencanaan Kegiatan Anggaran dengan menggunakan SIKD, sedang untuk menyempurnakan-nya digunakanlah SIMDA.

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Regional Financial Information System (SIKD) at the Regional Financial Management Agency of Kotamobagu City. This study uses a descriptive qualitative research method. The data source used in this study is primary data obtained from the results of observations and interviews submitted to informants. The data analysis technique used in this study is descriptive analysis using the theory of Delone & Mclean in 1981 which is called the *Success Theory / Success model*. Based on the results of the study, it shows that the Regional Financial Information System (SIKD), in its implementation at the BPKD of Kotamobagu City has not been fully implemented, where the BPKD agency of Kotamobagu City to perfect the purpose of its reporting system divides its input with details of the Budget Activity planning using SIKD, while to perfect it SIMDA is used.

@2024 Nurwindi Sahrudin, Mattoasi, Ayu Rakhma Wuryandini

Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah menggunakan sistem informasi keuangan daerah yang disediakan oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan khususnya produk dari (Deputi IV) yaitu Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah melalui pemanfaatan teknologi dan informasi yang terhubung langsung dengan database, aplikasi itu adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintah yang baik (*good governance*), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan 2 kemampuan yaitu kemampuan mengelola keuangan daerah dan kemampuan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik (Dewi & Mimba 2014).

Perubahan dari SIMDA menjadi SIPD menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dimaksudkan untuk memudahkan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana seperti yang tertuang di dalam pasal 391 dan Pasal 395 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian juga Wurara *et al* (2020) menanggapi bahwa dengan dikeluarkannya UU No 23 tahun 2014, maka disertai dengan Permendagri No.70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaan SIPD di BPKD di Kota Kotamobagu masih ditemukan beberapa kendala diantaranya masih terjadi beberapa kesalahan penatausahaan keuangan atau beberapa fungsi akuntansi belum berjalan secara maksimal sehingga mengalami penumpukan dokumen atau laporan keuangan (Kasubag bidang Penagihan Pajak Daerah, 2021).

Hal ini juga senada dengan penelitian Wartini & Yasa (2016) bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) perlu lebih dimantapkan lagi agar terintegrasi dengan semua lini terkait, sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang andal dan tepat waktu disamping kualitas sumber daya manusia sebagai penentu keberhasilan, harus ditingkatkan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) seperti yang telah dilakukan Sitohang & Kariono (2017) Namun pada kenyataan, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang telah digunakan Pemerintah Kabupaten Dairi dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 khusus pada modul pertanggungjawaban belum maksimal dimana pada modul pertanggungjawaban masih belum menghasilkan output berupa laporan-laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan ke pihak stakeholder maupun ke Pemerintah pusat secara e-audit. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan daerah tersebut.

KAJIAN TEORI

Sistem Informasi

Sistem Informasi menurut Wicaksono & Mispiyanti (2019) adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian

yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi organisasi untuk menyediakan laporan-laporan yang diperlukan pihak luar tertentu. Menurut Wurara et al (2020) Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi.

Keuangan Daerah

Sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2005, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut UU Nomor 23 tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Khusaini 2018). Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Kaunang & Naukoko 2016).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Mardiasomo mengemukakan acuan dalam suatu sistem pengelolaan daerah, meliputi pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi anggaran tetapi juga pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya. Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan (Karianga 2017).

Konsep Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

a. Pengertian Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Wartini & Yasa 2016).

b. Tujuan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi keuangan daerah (SIKD) mempunyai tujuan diantaranya untuk membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah. Penyelenggaraan SIKD juga untuk mendukung pemerintahan daerah dalam menyusun anggaran daerah, pelaksanaan anggaran dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah. Penilaian terhadap peranan sistem informasi mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan digunakan oleh SKPD dan SKPKD (Sahusilawane 2017).

c. Fungsi Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi keuangan daerah yang selama ini digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana diketahui program aplikasi komputer yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Barang Milik Daerah belum terintegrasi (Wartini & Yasa 2016) SIKD mendukung porting oleh teknologi dapat diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah dalam melakukan kegiatan SIKD (Indriasari et al 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang diajukan kepada para informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan teori Delone & Mclean Tahun 1981 yang diberi nama *Success Theory/Success model*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengoptimisasi penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan daerah harus ada beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam sebuah perusahaan maupun instansi pemerintahan sehingga perlu dilakukan secara terencana, terarah dalam rangka menunjang kemampuan dan profesionalisme. Dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya mampu menunjang kualitas informasi keuangan. Sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya tidak lepas dari kinerja sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya melalui bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang cukup memadai dibidang yang diatekuni. Begitupun dalam hal para pengguna Sistem Informasi Keuangan Daerah harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang bagus, dimana para pengguna harus dapat menjalankan atau menggunakan komputer.

Dalam proses optimalisasi penggunaan SIKD erat kaitannya dengan ketersediaan SDM dalam mendukung program aplikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, namun untuk menunjang optimalnya penggunaan system ini sumber daya

manusia tidak akan bisa mengoptimalkan penggunaan SIKD tanpa adanya keahlian dan dibekali dengan berbagai pelatihan untuk mengelola system ini. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak PS selaku Kepala BPKD yang mengatakan bahwa :

”Tentu saja keahlian dalam teknologi informasi sangat dibutuhkan, hal ini akan sangat membantu mempermudah sumber daya manusia yang ada dalam proses penggunaannya, meskipun begitu masih harus tetap mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada untuk lebih memahami dengan baik tentang sistem yang ada”

Selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa kasubag dan staf yang ada di BPKD Kota Kotamobagu, salah satunya bapak GM selaku Kepala Bidang Anggaran mengatakan bahwa:

“Tentu saja karena dengan memiliki keahlian khusus ini menjadi dasar nantinya untuk menggunakan sistem ini.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu CI selaku Kepala Bagian Akuntansi & Pelaporan, beliau menyatakan bahwa:

“Iya, pengguna SIKD harus menguasai IT, dan mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft”

Sama halnya dengan Bapak YM selaku Staf Akuntansi dan Pelaporan, Bapak FA selaku Staf Anggaran juga mengungkapkan bahwa:

“Untuk hal itu sepertinya harus, ya minimal dasar-dasar oleh karena itu diadakannya pelatihan untuk melatih supaya para pengguna bisa paham dan mengoperasikannya dengan baik dan benar”

Berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pada umumnya informan menyatakan penerapan sistem yang baru harus didukung oleh keahlian khusus bagi pemakai sistem, pemberian pelatihan dan pembekalan terkait pengoperasian SIKD juga sangat penting diikuti dan diberikan bagi para pengguna SIKD dan para pengguna sistem ini pada instansi ini.

Hardware dan Software

Hardware

Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi yang sangat penting di instansi pemerintahan seperti perangkat komputer. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak PS selaku kepala BPKD Kota Kotamobagu perangkat komputer yang ada di instansi tersebut sudah cukup memadai, hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang mengatakan

bahwa :

“Untuk perangkat komputer yang tersedia saat ini tentu saja sudah sangat siap dan mampuni untuk menunjang proses penggunaan SIKD dengan baik”

Selain bapak PS, bapak GM selaku Kepala Bidang Anggaran mengatakan bahwa:

“Iya, sudah cukup menopang. Karena itukan aplikasi berbasis web.”

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu CI selaku Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan, beliau mengatakan:

“Untuk perangkat komputer sendiri kita telah memadai, hanya saja masih beberapa kendala. Kendala utama di daerah ini adalah dari seringnya pemadaman listrik, karena semua server ada di infokom, ketika listrik sudah menyala, server belum tentu juga menyala. Yang kedua dari jaringan internet yang sering terputus, jadi penggunaan SIKD menjadi lambat.”

Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak FA Staf Anggaran, bahwa:

“Iya, semua perangkat computer yang ada sudah memadai dan memenuhi syarat untuk mengoperasikan SIKD dengan baik”

Selain itu, bapak YM Staf akuntansi dan pelaporan mengutarakan:

“Tentu saja, semua perangkat computer yang ada bisa dibilang sudah sangat layak dan mampuni untuk digunakan dalam penggunaan SIKD”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa semua perangkat computer yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah khususnya pada instansi BPKD Kota Kotamobagu sudah cukup baik memberikan fasilitas pada perangkat komputer yang dibutuhkan terkait dalam hal kerja sistem SIKD, karena apa yang telah disiapkan oleh instansi sudah cukup menopang dengan baik kerja pada sistem tersebut.

Estimasi Waktu

Berbicara terkait sistem informasi keuangan daerah yang telah digunakan dan dipakai oleh pemerintah khususnya pada Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) untuk membantu bagi para kepala bidang dan staff dalam hal mengelola keuangan daerah, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan membuat proses kerja menjadi lebih cepat. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak PSY selaku Kepala BPKD Kota Kotamobagu, yang menanggapi bahwa:

“Untuk hal ini belum bisa dinilai lebih efisien atau tidak, disamping penggunaannya yang belum maksimal juga masih terdapat banyak bug atau

system error pada saat proses penggunaannya, saat ini untuk menyempurnakan pencatatan atau pelaporan masih menggunakan sistem yang lama yaitu SIMDA.”

Kemudian, hasil wawancara dengan Bapak GM mengatakan bahwa:

“Sejauh ini belum bisa diukur, karena penata usahanya sampai saat ini belum dapat dijalankan seratus persen”

Selain itu, hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu CI bahwa:

“Masih belum bisa di ketahui, karena prosesnya baru sampai di tahap perencanaan untuk penyusunan, perencanaan kegiatan sudah masuk, tapi untuk penata usahaan belum masuk. Jadi untuk sementara pelaporan masih menggunakan sistem yang lama, SIMDA”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak YM selaku staf Akuntansi dan Pelaporan, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk mengetahui SIKD lebih efisien atau tidak, masih belum dipastikan karena penggunaannya yang masih belum maksimal maka belum bisa dinilai apakah SIKD lebih efisien atau tidak”

Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak FA, bahwa:

“Belum cukup maksimal dalam merumuskan kebijakan keuangan masih perlu dioptimalkan di segala lini”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam hal penginputan data-data keuangan instansi pemerintahan, masih belum dikatakan dapat mengefisienkan waktu karena masih belum sempurnanya penggunaan web tersebut sehingga untuk pelaporannya masih menggunakan sistem yang lama yaitu SIMDA.

Akses Informasi

Setiap badan public mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi yang berkaitan dengan masyarakat yang luas. Lingkup badan publik dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) / anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 13 UU No.14 Tahun 2008 setiap badan publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi

secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Seperti yang sudah peneliti wawancara yaitu dengan bapak PSY, beliau mengatakan bahwa :

“Akses informasi yang SIKD atau secara umum SIPD ini untuk sementara hanya dapat di akses oleh yang benar-benar diperuntukkan saja, mengingat sistem ini belum berjalan dengan maksimal”

Demikian juga dengan bapak GM, mengatakan:

“Kami sendiripun kadang tidak bisa akses karena masih sering terjadi bug atau gangguan sistem pada web”

Hal ini juga dikatakan oleh Ibu CI, yaitu:

“Sebenarnya jika sudah sempurna atau sudah bisa digunakan secara full SIPD ini bisa diakses oleh masyarakat tetapi, hanya sebatas gambaran umum pemerintahan saja karna di web tersebut memiliki kurang lebih tiga menu utama.”

Selain itu, bapak YM dan FA selaku staf Anggaran dan staf Akuntansi dan Peaporan juga mengatakan hal yang senada, yaitu:

“Untuk sementara akses untuk SIPD terkhusus menu SIKD ini masih sangat terbatas, dikarenakan masih banyak kendala server yang masih belum di ketahui pasti apa penyebabnya sehingga SIKD ini juga belum digunakan secara efektif.”

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, SIKD tersebut dapat di akses oleh siapa saja. Tetapi karena belum sempurnanya web tersebut, sehingga untuk mengaksesnya masih terbatas bahkan untuk pengguna pada instansi pemerintahan saja masih banyak kendala.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap (protap) adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi (instansi pemerintah) secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian melalui wawancara dengan Bapak PSY selaku Kepala BPKD Kota Kotamobagu, beliau mengatakan bahwa:

“Masih belum, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa masih terdapat banyak bug atau system error pada saat proses penggunaannya. Dengan adanya hal seperti ini maka dibutuhkan upgrade ataupun perbaikan-perbaikan yang nantinya akan membantu system agar dapat digunakan sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah”

Hal ini juga dinyatakan oleh Bapak GM, yaitu:

“Masih belum bisa dikatakan, karena aplikasi yang sekarang digunakan untuk penyempurnaan pelaporan masih menggunakan SIMDA, yang merupakan produk dari BPKP yang juga sudah berusaha memenuhi ketentuan dari Permendagri, baik dari kode rekening yang terbaru, yang juga sudah sesuai.”

Begitu juga di ungkapkan oleh Ibu CI, bahwa:

“Belum, karena sampai saat ini masih dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis dari Kemendagri, jadi mau tidak mau harus tetap menggunakan sistem yang lama, agar pekerjaan tetap berjalan.”

Hal ini dikatakan juga oleh Bapak YM, beliau mengatakan bahwa:

“Belum, dalam penerapannya saja masih belum maksimal dan masih sering terjadi kendala pada saat penggunaannya”

Kemudian hal tersebut diungkapkan juga oleh Bapak FA, yaitu:

“Tentu saja untuk saat ini, hal yang bisa dilakukan adalah memperbanyak pelatihan-pelatihan agar supaya sumber daya manusia yang ada bisa lebih mengetahui tentang system ini dan bisa menggunakannya dengan maksimal”

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa, penggunaan sistem tersebut belum sesuai dengan SOP. Dikarenakan masih lemahnya pelatihan atau bimbingan teknis yang dilakukan, dan juga masih perlu banyak perbaikan pada sistem SIKD.

PEMBAHASAN

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan kekuatan atau kemampuan yang dimiliki manusia yang diperlukan dalam kemajuan suatu organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwasannya pada umumnya informan menyatakan penerapan sistem yang baru harus didukung oleh keahlian khusus bagi pemakai sistem, pemberian pelatihan dan pembekalan terkait pengoperasian SIKD juga sangat penting diikuti dan diberikan bagi para pengguna SIKD dan para pengguna sistem ini pada instansi ini.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang oleh Sitohang & Kariono (2017) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan mengaplikasikan SIKD, karena kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan berkompeten akan mudah mengerjakannya. Dengan ketersediaan aparatur yang menguasai IT yang mahir dan terlatih merupakan suatu hal

yang penting keberadaannya dalam keberhasilan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi keuangan daerah.

Kemudian penelitian serupa dilakukan oleh Afandi et al (2024) menyatakan bahwa pelatihan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru tentang konsep, metode, dan praktik terkini dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan ini membantu individu memahami fitur dan fungsi sistem informasi keuangan, serta mengoptimalkan penggunaannya. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, individu dapat lebih efektif dalam menggunakan sistem, memastikan akurasi data, dan menerapkan praktik terbaik dalam pengambilan keputusan keuangan.

Hardware & Software

Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi yang sangat penting di instansi pemerintahan seperti perangkat komputer. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwasannya semuaperangkatkomputeryangtelahdisiapkanolehpemerintah daerah khususnya pada instansi BPKD Kota Kotamobagu sudah cukup baik memberikan fasilitas pada perangkat komputer yang dibutuhkan terkait dalam hal kerja sistem SIKD, karena apa yang telah disiapkan oleh instansi sudah cukup menopang dengan baik kerja pada sistem tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paat & Saleh (2023) menyatakan bahwa sinyal jaringan yang lemah di daerah karena keterbatasan kemampuan penyelenggara layanan jaringan internet untuk mengakses SIKD sehingga ketidaksiapan SIKD ditudingkan kepada pemerintah daerah. Ketika SIPD sedang digunakan di beberapa area sekaligus, itu mungkin membebani server yang menampung layanan, yang menyebabkan kegagalan dan pemadaman.

Jadi dari hasil penjelasan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi perangkat computer di instansi tersebut sudah memadai dan sudah sangat mendukung untuk penggunaan sistem SIKD, akan tetapi peneliti masih terdapat kendala dalam hal penggunaan-nya, yaitu seringnya terjadi pemadaman listrik yang berada di instansi tersebut yang mengakibatkan terputusnya jaringan internet. Akibatnya dalam proses penggunaan SIKD menjadi terganggu. Untuk keamanan sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari kepemilikan user ID untuk setiap masing-masing pengguna operator pengguna sistem SIKD. Inilah yang membuat SIKD tidak dapat digunakan oleh sembarang pihak. Hal ini bertujuan untuk tetap bisa menjaga keaslian dan keamanan datanya.

Estimasi Waktu

Estimasi waktu merupakan suatu bentuk penilaian ataupun perkiraan mengenai waktu yang masih dalam prediksi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwasannya dengan adanya sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam hal penginputan data-data keuangan instansi pemerintahan, masih belum dikatakan dapat mengefisienkan waktu karena masih belum sempurnanya penggunaan web tersebut sehingga untuk pelaporannya masih

menggunakan sistem yang lama yaitu SIMDA.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wartini & Yasa (2016) menyatakan bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas Sistem Informasi, penyedia layanan agar meningkatkan kualitas pelayanan yaitu diantaranya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan/transfer knowledge pengoperasionalan sistem bagi pengguna, karena sumber daya manusia merupakan faktor penentu kesuksesan implementasi sistem informasi. Survey kepuasan pengguna sistem informasi secara berkala perlu dilakukan, sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pengembangan sistem oleh pengambil kebijakan. Sehingga penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jember menjadi benar-benar efektif dan efisien.

Jadi dari hasil penjelasan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggunaan sistem pelaporan keuangan SIKD masih belum dapat diukur efisiensi waktu-nya, disebabkan masih kurangnya pelatihan yang diadakan untuk melatih kemampuan serta pemahaman mengenai penggunaan sistem pelaporan keuangan SIKD. Penggunaan sistem SIKD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu baru sampai pada tahap perencanaan dan penganggaran dan belum maksimal menjawab semua tahap sistem pelaporan keuangan yang ada.

Akses Informasi

Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. Salah satu cara untuk memperoleh informasi dengan menggunakan alat berupa telekomunikasi dan melalui saluran atau media. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwasannya SIKD tersebut dapat di akses oleh siapa saja. Tetapi karena belum sempurnanya web tersebut, sehingga untuk mengaksesnya masih terbatas bahkan untuk pengguna pada instansi pemerintahan saja dan masih terdapat banyak kendala.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasim et al (2023) mengungkapkan bahwa kualitas informasi dalam optimalisasi penggunaan sistem informasi keuangan di daerah kabupaten biak numfor. Dilihat kondisi yang ada pada aspek tersebut belum optimal karena sistem yang tersedia belum memadai. Artinya apa bahwa ketika sistem yang dibutuhkan tersedia maka kualitas informasi yang akan didapatkan akan cepat diterima sehingga hal tersebut mempengaruhi bahwa kualitas informasi dan sistem berjalan dengan baik karena tingkat penggunaan dalam tercapai dengan baik.

Jadi dari hasil penjelasan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk bisa mengakses system informasi keuangan daerah (SIKD) membutuhkan user id dan password yang tidak dimiliki oleh khalayak umum dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Hal itu dikarenakan hanya orang-orang tersebut yang punya user id dan password untuk bisa mengakses SIKD itu sendiri.

Standard Operating Prosedures (SOP)

Standard operating prosedur merupakan rangkaian prosedur yang dimiliki oleh instansi atau perusahaan. Dimana hal tersebut digunakan sebagai panduan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa

penggunaan sistem tersebut belum sesuai dengan SOP. Dikarenakan masih lemahnya pelatihan atau bimbingan teknis yang dilakukan, dan juga masih perlu banyak perbaikan pada sistem SIKD.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Indriyani (2019) bahwa sistem informasi keuangan daerah yang ada di dinas ini dalam Penyajian informasi keuangan dan implementasi pengelolaan SIKD belum sesuai dengan harapan yang bisa menunjang berkembangnya dinas tersebut, karena sistem informasi keuangan daerah belum sepenuhnya membantu kepala daerah untuk merumuskan kebijakan keuangan serta untuk pengelolaan keuangan pada program kerja yang akan dan telah dilaksanakan dan administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di dinas tersebut masih belum optimal.

Kemudian penelitian serupa dilakukan oleh Sitohang & Kariono (2017) Namun pada kenyataan, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang telah digunakan Pemerintah Kabupaten Dairi dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 khusus pada modul pertanggungjawaban belum maksimal dimana pada modul pertanggungjawaban masih belum menghasilkan output berupa laporan-laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan ke pihak stakeholder maupun ke Pemerintah pusat secara e-audit. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan daerah tersebut.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu masih belum diterapkan secara optimal. Hal ini juga senada dengan penelitian Wartini & Yasa (2016) bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) perlu lebih dimantapkan lagi agar terintegrasi dengan semua lini terkait, sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang andal dan tepat waktu disamping kualitas sumber daya manusia sebagai penentu keberhasilan, harus ditingkatkan. Sejalan dengan penelitian tersebut, Ikhyannuddin (2017) juga mengutarakan bahwa untuk meningkatkan kinerja penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan khususnya di lingkungan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD). Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan sistem akuntansi pemerintahan yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berbasis teknologi informasi (komputer). Namun demikian dari hasil observasi pendahuluan terungkap, bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah ini belum digunakan secara optimal oleh para pejabat, bendahara dan staf keuangan SKPD untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dalam pelaksanaan-nya pada BPKD Kota Kotamobagu belum dilaksanakan secara penuh, dimana instansi BPKD Kota Kotamobagu untuk menyempurnakan tujuan dari adanya sistem pelaporannya membagi peng-inputannya dengan rincian perencanaan Kegiatan Anggaran dengan menggunakan SIKD, sedang untuk menyempurnakan-nya

digunakanlah SIMDA.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan diatas, makasaran penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Saran peneliti agar BPKD Kota Kotamobagu terkait dengan Sumber Daya Manusia yang diperlukan untuk terus mengupayakan pelatihan dan menyempurnakan ketersediaan kebutuhan daripada sumber daya manusia aparatur yang akan menjadi operator dari Sistem Infromasi Keuangan Daerah (SIKD) agar pembelajaran terkait dengan Sistem tersebut tidak terkendala seperti yang telah terjadi sebelumnya.
- b) Terkait dengan *Hardware* dan *Software* dari pada penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah, peneliti menyarankan untuk lebih memperhatikan aspek ketersediannya serta pemeliharaan dari kedua hal tersebut.
- c) Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teknik analisis metode kuantitatif terkait sistem informasi keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., Maisyarah, N. D., & AlParok. (2020). Regional Financial Information Systems Effect on Sarolangun Local Government Financial Transparency and Accountability of Financial Report. 125(33), 35–42. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.178>
- Arifiantika, J. (2015). Analisis Tingkat Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Melalui Model Delone and Mclean. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Edisi Khusus Juni, 11, 94–101.
- Ayu, I., Emawati, A., & Bambang, H. (2019). Measuring the Success of SIPKD in Denpasar City. 1–17.
- Creswell, J. W. (2015). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. In Health Promotion Practice (Vol. 16, Issue 4). <https://doi.org/10.1177/152483991558094>
- Darise, N. (2009). Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 2.
- Dewi, P. A. R., & Mimba, N. P. S. H. (2014). Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 8(3), 442–457. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8252>
- Dr. Hendra Karianga, S.H., M. H. (2017). Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik.
- Fachri, Z., & Mediaty. (2019). Analysis Using Region'S Financial Accounting Information System on the Quality of Local Government Finance Reports. Hasanuddin Economics and Business Review, 3(1), 13. <https://doi.org/10.26487/hebr.v3i1.1489>

- Fatimah, F., & Indrayani, I. (2019). Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Sebagai Proses Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidenreng Rappang). *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 37. <https://doi.org/10.31850/economos.v2i2.520>
- Hertanto, Domain, & Amin. (2016). PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1, 15–24.
- Ikhyanuddin. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Di Kabupaten Aceh Besar. *Journal of Economic Management & Business*, 18(1), 25–50.
- Indriasari, R., Sudarma, M., Rosidi, R., Mardiaty, E., & Khairin, F. N. (2017). Strengthening Government Apparatus for the Success of Technology-Based Local Finance Information Systems (SIKD). *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 20(2), 169–176. <https://doi.org/10.14414/jebav.v20i2.1129>
- Kaunang, C. E., & Naukoko, A. T. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 355–365
- Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah
- Lestari, K. C., & Amri, A. M. (2020). Sistem Informasi Akuntansi.
- Mariana, A., Wahjono, S. I., Syaban, M., & Suarni, A. (2018). Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktikal.
- Moleong, Lexy J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. remaja rosdakarya.
- Nugraha, H. A., & Astuti, Y. W. (2013). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(1), 25–33.
- On, A. S., Commodity, I., With, M., Reference, S., & Exchange, C. (2018). *International Journal of Research Science & Management*. 5(6), 15–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1254391>
- Perencanaan, B., Daerah, P., Manado, K., Nadya, C., & Wurara, C. (2020). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–13.
- Primasari, D. (2017). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kinerja Pegawai Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(April), 153–166. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3581>
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik.
- Sagara, Y. (2015). The Effect of Implementasi Accounting Information System and Competence of Human Resources on The Quality of Financial Reporting. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 111–115. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.895.4452&rep=rep1>

- p1&type=pdf
- Sahusilawane, W. (2017). Pengaruh Pelatihan Dan Kejelasan Tujuan Dalam Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Kasp. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 59.
- Saputri, L. G. (2016). Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas, dan Kondisi yang Memfasilitasi Pengguna Terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) (Survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen). 91, 399–404.
- Sari, E. N., Muhyarsyah, & Wahyuni, N. S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Indormasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara. 21(2)
- Sedarmayanti. (2009). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.
- Sitohang, & Kariono. (2017). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi Rayambong. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sugiyono. (2018). metodologi penelitian kualitatif kuantitatif dan r&d. alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.
- Supriyono. (2000). Sistem Pengendalian Manajemen.
- Suryanto, S. (2019). Analysis of Regional Financial Information Systems As A Media of Regional Financial Management Transparency in Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 662(2). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/662/2/022080>
- Utami, D. A. (2013). Effectiveness Of Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) In Gresik Regency Siswo Dwi Irfianto Dian Arlupi Utami.
- Wartini, N. N., & Yasa, I. G. W. M. (2016). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas*, 5, 1411–1438.
- Wicaksono, R., & Mispianiti. (2019). Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Aparatur Pemerintah Daerah. *InFestasi : Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15(2), 177–190. <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/600>
- Widjajanto, N. (2001). Sistem Informasi Akuntansi.
- Yogasworo, N. A., & Suprayitno. (2020). Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Informasi Pada Sistem Informasi Keuangan Daerah. 22(2), 109–138. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.1249>